



Dinas
pmd
KABUPATEN LAMONGAN

Desa
Berjaya

Lamongan
Megilan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Laporan Pengelolaan Risiko

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan**

Tribulan IV – Tahun 2025



dpm.dlamongan



lamongankab.go.id/dinpm



Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmdu@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 05 Januari 2026

Nomor : 400.10/ 07 /413.108/2026

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
TRIBULAN IV Tahun 2025 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan

Kepada :

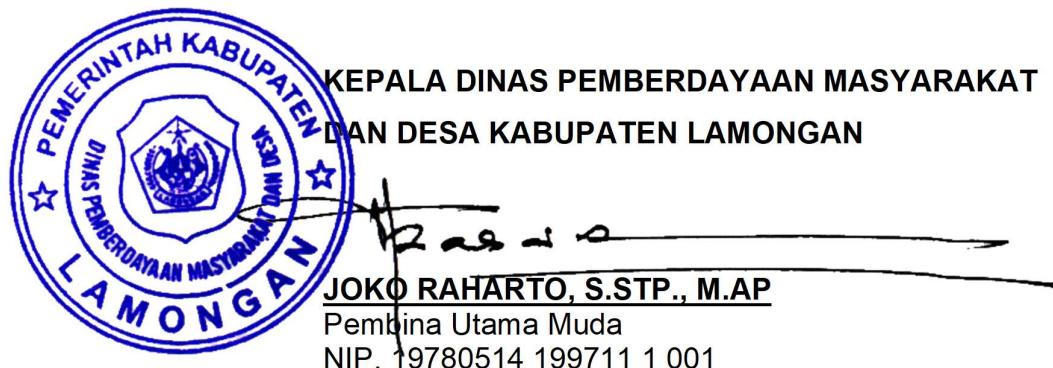
Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

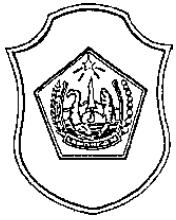
Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

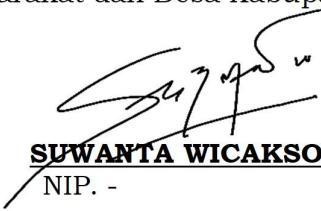
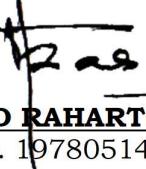


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 400.10/ 07 /413.108/2026

TANGGAL TERBIT : 05 Oktober 2026

Disiapkan Oleh	:	Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  SIWANTA WICAKSONO, SE NIP. -
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  ERWIN MAHBUB JUNIDI, SE NIP. 19790408 201001 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP NIP. 19780514 199711 1 001 

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSLUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan IV sebagaimana terlampir:
(lampiran form 9 dari simario berikut ini)

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2025					
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	13	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	10	DPMD - Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	12	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	12	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa	Data mengenai aset desa tidak ada	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	11	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset & Sumber Daya Desa	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Silitap Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	11	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	10	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	11	DPMD	Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penggunaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	11	DPMD	Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	10	DPMD	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	11	DPMD	Data mengenai aset desa tidak ada	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	9	DPMD	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer 2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan 3. Silitap Kades dan Perangkat tidak bisa dicairkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	8	DPMD	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	8	DPMD	Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya sebatas pertemuan dan arisan	Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan hanya beberapa orang yang aktif terlibat dalam kegiatan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Penilaian Kegiatan (RTP CEE)

Simpulan

[Dinas Terkait](#) / [Pemerintah Kabupaten Lamongan](#) / [Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa](#) / [Penilaian Kegiatan \(RTP CEE\)](#) / Review

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	Untuk meningkatkan lagi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024, mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis meningkatnya manajemen internal Dinas PMD dengan indikator nilai SAKIP, indikator tsb berisian, meningkatkan kinerja pada tahun 2025 untuk merealisasikan sesuai dengan target yang direncanakan	Sesuai dengan Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai terkait Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2024, maka Rencana Tindak Perbaikan dalam Lingkungan Pengendalian (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) akan mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis, serta meningkatkan kinerja pada tahun 2025 realisasi sesuai dengan target yang direncanakan	Dinas PMD Kabupaten Lamongan	Januari - Desember
8	-	-	-	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	Sosialisasi Batas Desa	-	Sosialisasi Batas Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Desember
2	Pengusaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	Pelatihan Admin BUMDesa	-	Pelatihan Admin BUMDesa	DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	Bimtek Kapasitas Operator Desa	-	Bimtek Kapasitas Operator Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
4	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
5	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	Monev ABDesa	-	Monev ABDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.25.13.21.01	Melengkapi Tanda Batas Desa	-	Melengkapi Tanda Batas Desa	DPMD - Bidang Pemerintahan Desa	Januari - Desember
2	Pengusaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.25.13.21.02	Memahami Pengelolaan BUMDesa	-	Memahami Pengelolaan BUMDesa	DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.25.13.21.03	Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa	-	Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
4	Aset desa yang belum terinventarisir	ROO.25.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
5	APBDesa tidak tepat waktu	ROO.25.13.21.05	Monev ABDesa	-	Monev ABDesa	DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Januari - Desember
6	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.25.13.21.06	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	-	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember
7	Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang beragamnya program TP PKK desa	ROO.25.13.21.07	Pelatihan Administrasi PKK	-	Pelatihan Administrasi PKK	DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari - Desember

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

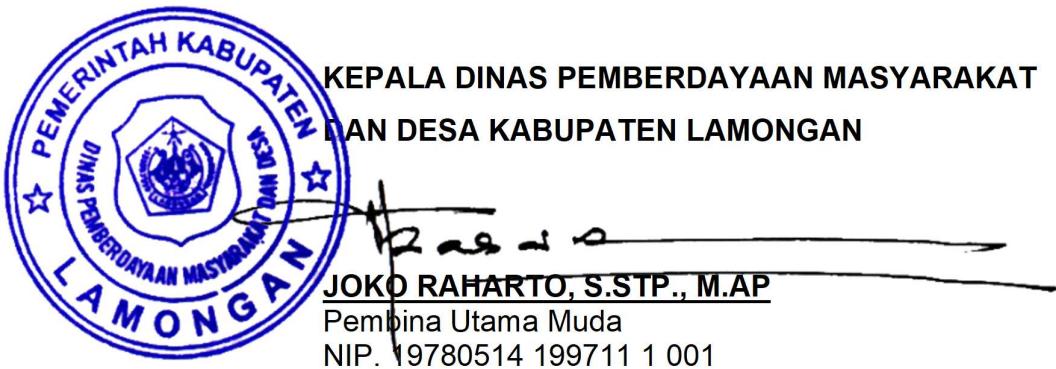
Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

Formulir Kertas Kerja
Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Sosialisasi Batas Desa	Sosialisasi	DPMD	Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
2	Pelatihan Admin BUMDesa	Bimtek	DPMD	Direktur dan Anggota BUMDesa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Bimtek	DPMD	Operator Desa/ Sekdes	Januari - Desember	Januari - Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Pelatihan	DPMD	LPM/BPD/Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
5	Monev ABDesa	Monev	DPMD	Perangkat Desa, BendaBarda Desa, Sekdes, Kades	Januari - Desember	Januari - Desember	-
6	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Pelatihan	DPMD	Lembaga Desa, PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-
7	Pelatihan Administrasi PKK	Pelatihan	DPMD	Lembaga Desa, PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Melengkapi Tanda Batas Desa	Penegasan Batas Desa	Pemerintah Desa	Masyarakat Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
2	Memahami Pengelolaan BUMDesa	Kelola BUMDesa	BUMDesa	BUMDesa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
3	Perekruit Perangkat Desa/ Operator Desa	Pengangkatan Perangkat Desa/ Operator Desa	Pemerintah Desa	Operator/ Perangkat Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Pengetahuan Lembaga Desa	Pemerintah Desa	BPD/ LPM/ Lembaga Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
5	Monev ABDesa	Monev APBDesa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
6	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	Pengetahuan Lembaga Desa	Pemerintah Desa	BPD/ LPM/ Lembaga Desa	Januari - Desember	Januari - Desember	-
7	Pelatihan Administrasi PKK	Pengetahuan Administrasi PKK	Pemerintah Desa	Lembaga Desa/ PKK	Januari - Desember	Januari - Desember	-

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.



LAMPIRAN

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kemandirian Desa
Sasaran strategis OPD	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya Tali Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfertilasi Perataan Wilayahnya	Tahap pelaksanaan	Tidak Teridentifikasi Batas Desa yang Valid		Bidang Pemerintahan Desa	Tidak Dianggarkan	Internal	C	Sengketa Tanah Wilayah Desa	Pemerintah Desa	Menggunakan C Desa atau Petok	Penyusunan peraturan, pemeliharaan, pengawasannya, integrasi dan perencanaan tata ruang, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi	Penyusunan peraturan, pemeliharaan, pengawasannya, integrasi dan perencanaan tata ruang desa, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Perataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfertilasi Perataan Kewenangannya Kewenangannya	Tahap pelaksanaan	Lunturnya Budaya Lokal		Bidang Pemerintahan Desa	Tergerus Budaya Asing	Internal	C	Hilangnya Rasa Cinta kepada Budaya Lokal dan Adab	Pemerintah Desa	Melestarikan Budaya Lokal yang ada	Kapasitas aparatur desa, kurangnya pengawasannya, ketidaksesuaian kewenangan, kurangnya sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat	Penyusunan peraturan yang jelas, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengawasannya berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Perataan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfertilasi Perataan dan Kode Desa	Tahap pelaksanaan	Ketidaksesuaian administrasi, duplikasi data, koordinasi lemah, pelanggaran regulasi, dan rendahnya akuntabilitas		Bidang Pemerintahan Desa	SDM yang kurang memahami aturan, koordinasi dan pedoman yang lemah, data tidak lengkap, serta monitoring yang tidak rutin	Internal	C	Ketidaksesuaian data, duplikasi, koordinasi administrasi, potensi sengketa hukum, dan menurunnya akuntabilitas	Pemerintah Desa	Mengikuti Kelenturan Pemerintah Daerah	Ketidaksesuaian nama dan kode desa dengan regulasi dan pengawasannya, penyalahgunaan kewenangan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kesalahan administrasi	Menyempurnakan prosedur administrasi, meningkatkan koordinasi antara desa dan pemerintah daerah, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfertilasi	Tahap Pelaksanaan	Sarana dan prasarana desa dalam kondisi kurang baik		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana	Internal	C	Sarana dan prasarana tidak memadai	Desa / Pemerintah Daerah	Pengalokasian anggaran pemeliharaan telah dilakukan	Pengalokasian anggaran pemeliharaan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana desa	Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan atau pembangunan sarana dan prasarana desa	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 Bulan
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang di fasilitasi														
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Tahap pelaksanaan	Tidak Tercapainya Kesepakatan Kerja Sama Antar Desa		Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Perbedaan Kepentingan atau Visi Antara Desa	Internal	C	Potensi Ekonomi Desa Tidak Terkelola Secara Optimal	Pemerintah Desa	Adanya koordinasi antar desa yang bekerja sama	Kerja sama antar desa kurang maksimal	Koordinasi antar desa yang bekerja sama	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Tahap Pelaksanaan	Tidak Terbentuknya Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga		Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tidak Ada Kesepakatan Antar Pihak	Internal	C	Potensi Ekonomi Desa Tidak Terkelola Secara Optimal	Pemerintah Desa	Adanya koordinasi antar desa dengan pihak ketiga	kerja sama antar desa dengan pihak ketiga kurang maksimal	Koordinasi antar desa dengan pihak ketiga yang bekerja sama	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Sudah tidak ada anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tahap Pelaksanaan	Menghambat pemerintahan desa, merugikan masyarakat, dan dapat merimbunkan sanksi hukum.		Bidang Pemerintahan Desa	Lemahnya SDM, kurangnya pemeliharaan aturan, minimnya pengawasan, sanksi yang tidak memadai, serta rendahnya disiplin dan integritas aparatur desa.	Internal	C	Menyebabkan Masalah dalam pelaksanaan, keuangan, pembangunan, dan keperluan masyarakat serta dapat merimbunkan sanksi hukum.	Pemerintah Desa	Peningkatan SDM, penetapan administrasi, pemanfaatan teknologi, pengawasan yang kuat, serta disiplin dan transparansi aparatur desa	Standar kerja yang jelas, pengawasan rutin, evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, serta disiplin dan transparansi aparatur desa	Mencegah dan memperbaiki kesalahan administrasi agar tata kelola desa berjalan efektif dan akuntabel	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Tahap Pelaksanaan	Ketidakpastian Program yang ada di Desa		Bidang Pemerintahan Desa	Tidak ada Dasar Hukum yang mendasar	Internal	C	Akan terjadi Penyimpangan	Pemerintah Desa	Musyawarah Desa	Pembinaan Terkait Produk Hukum Desa	Melakukan Monitoring dan Musyawarah Desa terkait Produk Hukum Desa	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tahap Pelaksanaan	APBDesa tidak tepat waktu		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa	Internal	C	1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran dana transfer pembangunan 2. Pembangunan Desa tidak dilaksanakan 3. Sifat Kades dan perangkat tidak bisa dicarikan	Desa / Pemerintah Daerah	Pembinaan dan koordinasi penyusunan APBDesa telah dilakukan melalui camat.	Belum terjadi penyaluran dana transfer pembangunan Desa, pembangunan Desa tidak dilaksanakan	Menyelenggarakan Perubahan terhadap penyaluran dana transfer pembangunan APBDesa	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	3 bulan
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Tahap Pelaksanaan	Keterbatasan tenaga ahli operator di desa		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	SDM yang ada kurang mengalami dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Internal	C	Keterlambatan pelaporan berbasis aplikasi	Desa / Pemerintah Daerah	Pendampingan penggunaan aplikasi telah dilaksanakan.	Pemantauan operator belum membuahkan penggunaan aplikasi belum optimal	Dua tahapan analisis atau pelatihan kumpulan mengoperasikan atau tutorial aplikasi	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 tahun
	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Tahap Pelaksanaan	Kegagalan dalam proses dan hasil pembinaan yang dapat berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan desa		Bidang Pemerintahan Desa	Faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, serta aspek sosial dan politik	Internal	C	Menurunnya kinerja aparatur, rendahnya kualitas pelaksanaan publik, lemahnya tata kelola desa, serta meningkatnya risiko korupsi dan kekejadian kacerpatan masyarakat	Pemerintah Desa	Pembinaan yang aplikatif, pendampingan dan motivasi aparatur, alokasi anggaran memadai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan	Mengidentifikasi dan menurup celah-celah ini sangat penting agar pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kompetensi aparatur, dan mencegah terjadinya tindakan pemungutan uang	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur desa melalui standarisasi kompetensi, pelatihan rutin, pengembangan kompetensi, pengembangan teknologi, evaluasi kinerja, dan penghargaan	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Tahap Pelaksanaan	Musyawarah Desa tidak teraksesa sepujuk ketentuan dan/atau laporan fasilitasi terlambat/tidak lengkap		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan Musdes tidak memadai serta keputusan jawab dari desa rendah, jadwal/komitmen peserta desa.	Internal	C	Dokumen-reputasi Musdes tidak lengkap dan capaian indikator jumlah laporan fasilitasi tidak tercapai.	Desa / Pemerintah Daerah	Pembinaan, pendampingan, dan koordinasi pelaksanaan Musdes kepada desa telah dilaksanakan.	Standar formal, format, dan checklist dokumentasi, dan verifikasi laporan Musdes berdasarkan pada seiring pelaksanaan dan verifikasi laporan sebelum dilaksanakan.	Merketinggalan jurnal, format dan checklist dokumentasi Musdes, serta melakukan monitoring dan verifikasi laporan sebelum dilaksanakan.	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 bulan
	Sub Kegiatan : Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Tahap Pelaksanaan	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa terlambat/tidak lengkap sehingga dokumen hasil evaluasi tidak terpenuhi.		Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Pembangunan dokumen Perdes dari desa terlambat dan kapasitas evaluasi terbatas.	Internal	C	Perdes berpotensi tidak sesuai ketentuan dan indikator dokumen hasil evaluasi tidak terpenuhi.	Desa / Pemerintah Daerah	Koordinasi pembinaan dan pelaksanaan evaluasi Perdes telah dilakukan.	Jadwal dan kriteria evaluasi serta monitor dan pengawasan proses dan dokumentasi seiring terlambat	Menetapkan jadwal dan kriteria evaluasi serta monitor dan pengawasan proses dan dokumentasi seiring terlambat	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 bulan
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaran Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaran Kerja Sama antar Desa	Tahap Pelaksanaan	Pengembangan BUMDesa tidak berjalan optimal		Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi serta rendahnya pemahaman pengelola BUMDesa terhadap pengembangan usaha	Internal	C	Potensi usaha ekonomi masyarakat tidak terkait secara maksimal	Pemerintah Desa	Koordinasi dan komunikasi dengan pengelola BUMDesa	Koordinasi dan komunikasi dengan pengelola BUMDesa	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tahap Pelaksanaan	Terjadinya Penunjukan PJ dari PNS dan Juga PJ dari Perangkat Desa		Bidang Pemerintahan Desa	Menginggur Kepala Desa dan Diberhentikan Tidak Hormat	Internal	C	Apabila salah satu pihak calon Kepala Desa yang tidak terpilih, akan mengoreksi kinerja Kades terpilih	Pemerintah Desa	Kepada Desa Terpilih Harus merangkul semua warga termasuk pendukung yang tidak terpilih	Menginggur semua Tokoh Masyarakat	Pembinaan terhadap Kepala Desa	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tahap Pelaksanaan	Kelidkengkapan administrasi, ketidakpahaman regulasi, dan rendahnya capaian kinerja	Bidang Pemerintahan Desa	Ketidakvalidan data, sengketa administrasi, serta menurunnya akuntabilitas dan kepercayaan publik	Internal	C	Ketidakterlibatan administrasi, potensi masing-masing, menurunnya kinerja instansi, ketidakakuratan data, serta turunnya kepercayaan masyarakat	Pemerintah Desa	Standarisasi laporan, pengawas koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan monitoring berkala	Standarisasi prosedur dan laporan, pengawas pembinaan kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur dan monitoring berkala, serta penggunaan sistem pelaporan yang terbuka	terbuka, tepat waktu, dan sesuai ketentuan melalui SOP yang jelas, termasuk penyelesaian sengketa administrasi, pengawas aparatur, verifikasi berjalan, serta monitoring berkala, sehingga masing-masing instansi, hakum, dan kinerja dapat diminimalisir	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Tahap Pelaksanaan	Data tidak valid, perencanaan desa tidak tepat, dan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Bidang Pemerintahan Desa	SDM terbatas, pendampingan kurang, data tidak tersedia dengan baik, koordinasi lemah, kurang pengawas dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal	Internal	C	Perencanaan dan pengembangan keputusan desa menjadi tidak efektif, kualitas dokumen rendah, serta menurunnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat	Pemerintah Desa	Standarisasi, pendampingan, koordinasi, pemanfaatan teknologi, monitoring, dan transparansi	Akibat SDM terbatas, pendampingan dan koordinasi lemah, kualitas dokumen rendah, serta menurunnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat	memastikan Profil Desa yang akurat, mutakhir, dan detail akurasi sebagai dasar perencanaan desa, pengembangan keputusan melalui SOP pelatihan, koordinasi, pengembangan teknologi, monitoring, dan transparansi.	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tahap Pelaksanaan	Aset desa yang belum terinventarisir	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Data mengenai Aset desa tidak ada	Internal	C	Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa menjadi tidak transparan	Desa / Pemerintah Daerah	Pendataan aset desa telah dilakukan.	Data aset desa belum lengkap dan belum diperbarui	Inventarisasi aset desa	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	1 bulan
	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Tahap Pelaksanaan	Kegagalan dalam proses peningkatan kapasitas BPD yang dapat menurunkan kualitas fungsi pengawas, legislatif, dan representasi masyarakat desa.	Bidang Pemerintahan Desa	Perencanaan yang tidak tepat, metode pelatihan yang kurang aplikatif, motivasi dan keterampilan anggota yang berbeda-beda, ketidakpahaman anggaran/fasilitas, kurangnya monitoring, serta pengaruh politik atau konflik internal	Internal	C	Memahami fungsi legislatif dan pengawas, rendahnya kualitas tata kelola desa, berkurangnya akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat.	Pemerintah Desa	Perencanaan program pelatihan, pelaksanaan dengan metode aplikatif, monitoring dan evaluasi, regulasi pendukung, serta sarana komunikasi dan koordinasi	Perencanaan kurang matang, pelaksanaan tidak sepenuhnya aplikatif, keterbatasan dalam pelaksanaan, kurangnya monitoring, dan dukungan kelengkapan tidak konsisten	Gunakan metode pembelajaran aplikatif (workshop, studi kasus, simulasi rapat BPD)	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tahap Pelaksanaan	Mengganggu atau Menghambat Pelayanan di Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Agenda Tahunan dan Program dari Provinsi	Internal	C	Kurang tertibnya Administrasi di Desa dan Kurangnya Disiplin Perangkat Desa	Pemerintah Desa	Salah Satu Syarat Penetapan Status Desa	Analisa penyebab, peningkatan koordinasi, penyempurnaan prosedur, peningkatan kapasitas dan keterampilan, penerapan teknologi, pengelolaan sumber daya yang baik, serta evaluasi	Identifikasi penyebab kegagalan, peningkatan koordinasi, revisi prosedur, pelatihan aparatur, peningkatan kapasitas dan keterampilan, pengelolaan anggaran yang baik, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat	Bidang Pemerintahan Desa	TRIBULAN IV
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penyelenggaraan Masyarakat Hukum Adat yang Dikelola oleh Pemerintah Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Kelembagaan Masyarakat													
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Perbaikan, Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat, Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat, Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tahap Pelaksanaan	- Sarana dan prasarana seremonial kegiatan Tertara Menunggu Masuk Desa belum terpenuhi secara maksimal - Adanya kebutuhan sarana dan prasarana TMMD yang belum terkomodir dalam pembayarannya	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Keterbatasan fiskal daerah	Internal	C	sarana dan prasarana yang belum terkomodir pembayarannya ditanggung oleh pemerintah desa lokus TMMD	Pemerintah Desa dan Dinas PMD Lamongan	mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	tidak terkomodirnya secara penuh pembayaran sarana dan prasarana seremonial TMMD	- tidak terkomodirnya secara penuh pembayaran sarana dan prasarana seremonial TMMD - mengajukan usulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Juni - Agustus
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat, Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi Kapasitasnya	Tahap Pelaksanaan	- Keterfambatan pengajuan administrasi kelengkapan registrasi Posyandu - Pelaksanaan registrasi Posyandu 6 SPM ke Kementerian Dalam Negeri, adanya keterlebihan karena kurang optimalnya SDM Pemerintah Desa	Bidang Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kurang optimalnya SDM perangkat di tingkat Pemerintah Desa	Internal	C	hanya beberapa desa yang baru mengajukan permohonan registrasi ke Kementerian Dalam Negeri	Dinas PMD Lamongan	pembinaan dan pendampingan ke seluruh desa di Kabupaten Lamongan untuk pemenuhan administrasi Posyandu	masih adanya desa yang belum memahami tentang kelengkapan administrasi	pembinaan dan pendampingan ke seluruh desa di Kabupaten Lamongan untuk pemenuhan administrasi Posyandu	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Januari - Desember
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Binaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tahap Pelaksanaan	Tidak Terbentuknya Pengembangan BUMDesa	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Tidak Adanya Monitoring dan Evaluasi	Internal	C	Potensi usaha ekonomi masyarakat tidak terkelola secara maksimal	Bumdes dan Pemerintah Desa	Melakukan Koordinasi & Komunikasi	Kurangnya Pemahaman Pengelola BUMDesa	Penyuluhan Kegiatan Pengembangan BUMDesa	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Januari - Desember
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Binaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tahap Pelaksanaan	TTG tidak termanfaatkan dengan baik	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Minimnya TTG di perdesaan	Internal	C	Pemanfaatan TTG di perdesaan tidak maksimal	Desa / pemerintah daerah	Sosialisasi teknologi tepat guna telah dilaksanakan secara terbatas.	Pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau seluruh desa dan belum terjadwal secara rutin.	Mengajukan kgiatan sosialisasi Teknologi Tepat guna di perdesaan	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	Juli - September
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tahap Pelaksanaan	- tidak optimalnya desa yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengikuti perlombaan BBGRM - ketidakadanya fasilitasi anggaran yang mendukung implementasi desa untuk mengikuti perlombaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bidang Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	keterbatasan fiskal daerah	Internal	C	pencapaian prestasi pemerintah Kabupaten Lamongan belum optimal di perlombaan BBGRM	Dinas PMD Lamongan	memberikan pembinaan dan motivasi kepada desa yang ditunjuk sebagai perwakilan Kabupaten Lamongan dalam perlombaan BBGRM	pencapaian prestasi pemerintah Kabupaten Lamongan yang ditunjuk sebagai perwakilan Kabupaten Lamongan dalam perlombaan BBGRM	memberikan pembinaan dan motivasi kepada desa yang ditunjuk sebagai perwakilan Kabupaten Lamongan dalam perlombaan BBGRM	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Mei - Juni
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Keteritamaan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Keteritamaan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tahap Pelaksanaan	Kurangnya Rasa aman dan nyaman Masyarakat di Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Sering terjadi konflik, kerusuhan dan maraknya kasus pencurian	Internal	C	Menganggung Aktivitas sehari-hari karena merasa terancam	Pemerintah Desa	Menghidupkan SISKAMPLING di tiap Dusun dan Membentukkan LINMAS	Koordinasi yang tidak baik antara desa dan pemerintah daerah, perbedaan paham, perbedaan sikap, dan perbedaan kebiasaan masyarakat, serta sistem pengawasan dan pengaduan yang transparan dan efektif	Peliharaan agarasi desa, koordinasi dengan pihak keamanan, pengawas kegiatan masyarakat, hingga penyediaan saluran pengaduan yang transparan.	Bidang Pemerintahan Desa	Juli - September
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tahap Pelaksanaan	- Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan - menyelenggarakan dengan kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan	Bidang Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	banyaknya kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan	Internal	C	Laporan Perangngajian/wabah petugasannya kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Dinas PMD Lamongan	meningkatkan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK sebagaimana jadwal perencanaan yang sudah ditetapkan	mesi-adiang, kemungkinan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	meningkatkan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK sebagaimana jadwal perencanaan yang sudah ditetapkan	Bidang Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Januari - Desember



Lamongan, Desember 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Kabupaten Lamongan

12 ms 4 -
JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO FRAUD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026

Lamongan, Desember 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Kabupaten Lamongan